



LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN

Penyusunan Register Risiko Pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2023

Nomor : X.700/70/35.73.300/2023

Tanggal : 07 Juli 2023

**PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH
2023**



LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN

Penyusunan Register Risiko Pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2023

Nomor : X.700/70/35.73.300/2023

Tanggal : 07 Juli 2023

PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

2023



PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Gajahmada No. 2A Telp. (0341) 364450 ; 321276 Fax. (0341) 364450

MALANG

Kode Pos 65119

Nomor	: X.700/ 70/35.73.300/2023	Kepada
Tanggal	: 07 Juli 2023	Yth.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang di MALANG
Lampiran	: 1 berkas	
Sifat	: Penting	
Hal	: Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Register Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang.	

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Malang Nomor : 701/2.13/35.73.300/2023, tanggal 30 Mei 2023, untuk Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Register Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) dapat dilaporkan hasil pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Register Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang, yang telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditor Intern Pemerintah yang diterbitkan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dapat kami sampaikan hasil pendampingan dengan uraian sebagai berikut :

A. Dasar Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Fungsi Pengawasan Intern;
- 3) Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 4) Peraturan Walikota Nomor 61 tahun 2019 tentang Kedudukan , Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Malang;

5) Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Malang Nomor :
701/2.13/35.73.300/2023

2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk menyusun Register Risiko beserta dokumen pendukung yang diperlukan agar terwujud Penyelenggaraan Manajemen Risiko Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

3. Batasan Tanggung Jawab

Register Risiko dan dokumen pendukung lainnya menjadi tanggung jawab Manajemen Perangkat Daerah, Tanggung jawab kami terbatas pada pemaparan dan pemberian arahan penyusunan serta saran pada Manajemen Perangkat Daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pendampingan Penyusunan Register Risiko ini meliputi:

Penetapan Konteks, Identifikasi, Analisa, Penetapan Risiko Prioritas, Rencana Tindak Pengendalian, Metode Pemantauan, Infokom dan Monitoring.

5. Kondisi Sebelum Pendampingan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2022, masih dijumpai beberapa permasalahan berkaitan dengan Register Risiko yang tersaji, dan dapat berdampak pada hasil evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah yang kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pendampingan dalam rangka penyusunan Register Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang.

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Peserta

Kegiatan diikuti oleh Manajemen Perangkat Daerah yang terdiri dari pejabat struktural eselon 4, eselon 3 dan eselon 2 di lingkungan Perangkat Daerah.

b. Waktu dan Tempat

Kegiatan direncanakan mulai tanggal 26-27 Juni sampai 3-4 Juli 2023 dan pelaksanaan FGD selama 2(dua) hari kerja pada tanggal 5-6 Juli 2023 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang (DTKPMPTSP) Kota Malang dengan dibuka oleh Inspektur Daerah Kota Malang.

c. Metodologi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode desk (pendampingan langsung) dan experiance learning cycle (pembelajaran berdasarkan pengalaman). Metode tersebut merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan interaksi dan partisipasi peserta melalui pemaparan teori, penerapan (implementasi), diskusi, dan tanya jawab.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan mengenai Konsep Manajemen Risiko khususnya Identifikasi Risiko di tingkat Organisasi Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 yang secara garis besar meliputi:

- 1)Pemaparan singkat mengenai visi misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 dan Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah berdasarkan Renstra, dan dokumen perencanaan OPD;
- 2)Konsep Manajemen risiko, membedakan Risiko, sebab, dan dampak;
- 3)Penetapan Konteks Strategis OPD;
- 4)Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional OPD;
- 5)Analisa Risiko;
- 6)Penetapan Risiko Prioritas;
- 7)Kegiatan Pengendalian;
- 8)Pengkommunikasian;
- 9)Monitoring;
- 10) Pemberian saran atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2023;
- 11) Penandatanganan Berita Acara Hasil Pendampingan.

f. Simpulan dan Rekomendasi

1) Simpulan

Pembinaan atas Penyelenggaraan Manajemen Risiko ini terutama ditujukan untuk Tujuan Pendampingan penyusunan *Risk Register* ini adalah membuat daftar kejadian risiko yang mungkin terjadi, penyebab terjadinya risiko, dampak dan probabilitas terjadinya risiko, analisa, serta cara mengatasi dan mengendalikan risiko prioritas.

Dari hasil Pendampingan telah teridentifikasi risiko sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Risiko Strategis OPD	18
2	Risiko Operasional OPD	31
3	Risiko Prioritas Strategis OPD	7
4	Risiko Prioritas Operasional OPD	5
<i>* Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan pada Lampiran (terlampir)</i>		

2) Saran/Rekomendasi

Terkait hasil pendampingan sebagaimana tersebut diatas, kami sampaikan saran-saran sebagai bahan bagi manajemen untuk menyelenggarakan Manajemen Risiko, untuk membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) di tingkat Perangkat Daerah, dengan melaksanakan tindak lanjut hasil pendampingan penyusunan Register Risiko sebagai berikut:

- a. Melakukan update/reviu Register Risiko, baik risiko strategis dan operasional OPD secara berkala (ketika terdapat perubahan Renstra untuk Risiko Strategis dan Renja/RKA untuk Risiko Operasional);
- b. Melaporkan secara berjenjang atas risiko yang belum dapat ditekan/dikelola;
- c. Menyusun tabel Risk Residual sebagai jaminan efektifitas pengelolaan risiko dengan mencatat kejadian risiko dan melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian sesuai yang telah dituangkan dalam format Rencana dan Realisasi RTP Tahun 2023

d. Melakukan pemantauan atas Rencana dan Realiasi Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjas ama Saudara, kami ucapkan terimakasih

INSPEKTUR DAERAH KOTA MALANG



Drs. MULYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650627 198602 1 004

LAMPIRAN

1. Penetapan Konteks Pemda, Strategis Dan Operasional OPD
2. Kertas Kerja Identifikasi Risiko
3. Hasil Analisis Risiko
4. Peta Risiko
5. Daftar Risiko Strategis
6. Rencana Tindak Pengendalian dan Infokom
7. Pemantauan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
OPD yang Dinilai	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Sumber Data	: Renstra, Renja, Laporan Sakip, DPA		
Tujuan Strategis	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel		
Sasaran Strategis	1 Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal		
	2 Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif		
	3 Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik		
	4 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		
	5 Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		
IKU Renstra OPD	IKU		2023
	1 Tingkat partisipasi angkatan kerja		72
	2 Predikat WBK		75
	3 Rasio daya serap tenaga kerja		73
	4 persentase peningkatan nilai investasi daerah		0,04
	5 rasio penduduk yang bekerja		94,4%
	6 Indeks layanan SPBE pada aspek pelayanan publik		0,045
	7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		89
	8 Nilai SAKIP		81,83
Program	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase dok perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%
	2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang pelatihan berbasis kompetensi (1%) Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	1% 70%
	3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	78%
	4. Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.30%
	5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Penanaman Modal	80%
	6. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah minat investor	60%
	7. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan ijin dan non ijin PU	90%
		persentase Penerbitan ijin dan non ijin ekopar sosbud	90%
		Persentase realisasi target retribusi IMB	100%
	8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80%
	9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100%
Kegiatan	Kegiatan di TA 2023		

Menyetujui,

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

19790709 199810 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023
Urusan Pemerintahan	: Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
OPD yang Dinilai	: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sumber Data	: Renstra, Renja, Laporan Sakip, DPA
Tujuan Strategis	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel
Program DTKPMPTSP dan Kegiatan Utama 2023	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
	a Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	e Administrasi Umum Perangkat daerah
	f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	h Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
	a Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	b Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	3. Program Penempatan Tenaga Kerja
	a Pelayanan antar kerja di daerah kota
	4. Program Hubungan Industrial
	a Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kota
	5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	a Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota
	6. Program Promosi Penanaman Modal
	a Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota
	7. Program Pelayanan Penanaman Modal
	a Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota
	8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	a Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota
	9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	a Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kota
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.a Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan
	1.b Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu
	1.c Persentase barang milik daerah yang terinventarisir
	1.d Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian
	1.e Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi
	1.f Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD
	1.g Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti
	1.h Persentase barang milik daerah yang terpelihara
	2.a Jumlah pengangguran yang dilatih
	2.b Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina
	3.a Jumlah bursa kerja khusus wilayah Kota
	4.a Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
	5.a Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal
	6.a Jumlah kegiatan pameran penanaman modal
	7.a Jumlah layanan perizinan dan non perizinan sesuai standar

8.a	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	
9.a	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	

Menyetujui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ARIF TRISASTYAWAN S.STP.,M.Si
Pembina TK. I
19790709 199810 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA			
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023		
Sumber Data	RPJMD		
Visi	"Kota Malang Bermartabat"		
Misi Strategis RPJMD	Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga		
	Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan		
	Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender		
	Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel		
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	Misi ke 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender		
Tujuan Strategis RPJMD	1. Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
	2. Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (GINI RATIO)	
	3. Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berpihak Masyarakat Rentan dan Gender	Angka Kemiskinan (Indeks Modal Sosial)	
	4. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Refomasi Birokrasi (RB)	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	1. Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		
Sasaran RPJMD	I-1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	
	I-2	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sapsras kota secara terpadu	
	II-1	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan	
	II-2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial		
IKU Sasaran RPJMD	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase penurunan PMKS
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda		Tingkat Pengangguran Terbuka	
Prioritas pembangunan dan program unggulan		Program Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas perlindungan sosial	
		1. Program Penempatan Tenaga Kerja;	
		2. Program Hubungan Industrial;	
		3. Program Rehabilitasi Sosial;	
		4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;	
		5. Program Pemberdayaan Sosial;	
		6. Program Penanganan Bencana.	
Inteverensi Walikota dan wakil		1. Membangun Sarana Prasarana Sosial yang ramah terhadap penyandang difabel;	
		2. Pembangunan panti jompo terpadu berkonsep villa lansia di wilayah malang timur;	

		3. Membangun sistem distribusi bantuan social darurat;			
		4. Membangun sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus;			
		5. Membina dan Memberdayakan PMKS untuk lebih produktif.			
Urusan Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Nama Dinas Terkait		Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko		Uraian	Indikator Kinerja Utama	Fomulasi Perhitungan/ penjelasan	Target
Tujuan		Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jml Angkatan Kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikali seratus persen	72
			Predikat WBK	Penetapan WBK	75
Sasaran		1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	jml oejerha/buruh di perush swasta/PMA/PMDN dibagi juml perush	73
			persentase peningkatan nilai investasi daerah	Nilai investasi thn n dikurangi nilai invest tahun N-1 dikali 100%	4.00%
		2. Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	rasio penduduk yang bekerja	jml penddk bekerja dibagi jml angk kerja dikali 100%	94.4%%
		3. Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	Nilai indeks SPBE	4.50%
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	Nilai SKM	89
		5. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai ev SAKIP	81.83
Program Strategis					
Program		1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Bidang Urusan Tenaga Kerja		2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja			
		3. Program Penempatan Tenaga Kerja			
		4. Program Hubungan Industrial			
Bid Urusan Penanaman Modal		5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
		6. Program Promosi Penanaman Modal			
		7. Program Pelayanan Penanaman Modal			
		8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
		9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
Kegiatan					

Uraian Tugas Kerja : *(faint text)*

1. *(faint text)*

No	Uraian Tugas	Jenis Pekerjaan	Materi Pokok	Sifat Pekerjaan	Membaca	Membuat	Membaca	Membuat
1	Tugas-tugas pokok dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil
2	Tugas-tugas pokok dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

(faint text)

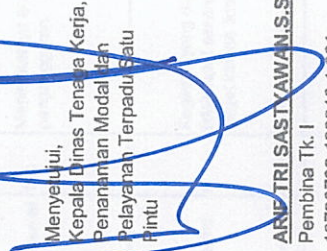
(faint text)

(faint text)

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
 Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023
 Urusan Pemetintahan : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Rasio Penduduk yang bekerja (94,4%)	d Urusan Tenaga Kerja dipisahkan dari Urusan PMPTSP dan direncanakan akan menjadi unit organisasi di bawah Sekretariat Daerah.	e	f Pemkot Malang : Walikota Sekda (bag	g Perubahan Peraturan (PP 6/2021 dan Permendagri 25/2021)	h Eksternal	i UC/C	j Tidak ada Dinas Teknis pengampu urusan bidang Tenaga Kerja	k Pemkot Malang : Tenaga Kerja/Masyarakat
			Tumpang tindih Program dan Kegiatan Pelatihan di bidang ketenagakerjaan dengan beberapa Perangkat Daerah.		Pemkot Malang : Walikota, Sekda, Bappeda	Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi atas program dan kegiatan yang komprehensif di tingkat Pemerintah Kota Malang.	Internal	C	Duplikasi Program Kegiatan dan Peserta Pelatihan dengan Perangkat Daerah lain: Pemborosan Keuangan Daerah	Pemkot Malang Tenaga Kerja/Masyarakat


ARIP TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si
 Pembina Tk. I
 19790709 199810 1 001

No	Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Renstra OPD	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Uraian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio Penduduk yang bekerja (94,4%)	Hubungan industrial tidak kondusif	RSO.BID0 1.03	Kepala Dinas	Man Kesadaran akan hak semakin tinggi Adanya provokator internal dan eksternal Gaya hidup dan peningkatan kebutuhan Ketidapkahaman atas peraturan Material Machine Money Hak yang diterima di bawah normatif Method Kegiatan yang dilaksanakan bintek tanpa dukungan basis data terkait perusahaan	Eksternal Internal	UC C	Demo-Sengketa ketenaga kerjaan	Pekerja Dinas Perusahaan Masyarakat	
		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Belum ada follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	RSO.BID0 1.04	Kepala Dinas	Man Material Machine Money Tidak ada anggaran terkait kegiatan follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan Method Belum ada kegiatan terkait follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	Internal	C	Tidak mengurangi angka pengangguran	Pemkot Dinas Bidang Masyarakat	
	BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Persentase peningkatan nilai investasi daerah (0,04)									
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Penanaman Modal	Nilai investasi daerah lebih rendah dibandingkan tahun lalu	RSO.BID0 2.01	KEPALA DINAS	Inflasi ; Kurangnya promosi & sosialisasi investasi daerah ; Ketersediaan infrastruktur kurang ; Kondisi sosial & tingkat kriminalitas.	Eksternal & Internal	UC & C	Investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya.	Pemerintah Daerah; Perangkat Daerah	
	Kegiatan: Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Keterlambatan penetapan PerDa terkait pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.	RSO.BID0 2.02	KEPALA DINAS	Belum ada target waktu penjadwalan Propomperda oleh Bag. Hukum dan alur penetapan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Malang ; Panjangnya alur, tahapan dan pihak yang terkait penetapan PerDa di luar dinas pengusul rancangan peraturan (Bag. Hukum, Harmonisasi dengan Kemerkumham, Pansus DPRD, Bito Hukum Provinsi, kembali ke Pansus DPRD, penetapan peraturan) ; Perubahan struktur organisasi Urusan Bidang Tenaga Kerja masih dalam pembahasan di lingkup pemerintah kota dan DPRD.	Eksternal UC		Tidak adanya payung hukum dalam pemberian fasilitas pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.	Pemerintah Daerah; Perangkat Daerah	

No	Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Renstra OPD	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Penetapan PerDa yang terhambat.	RSO.BID0 2.03	KEPALA DINAS	Adanya ketentuan yang mengatur DPMP/TSP berdiri sendiri di luar Dinas Tenaga Kerja (Permendagri 25 tahun 2021); Pangjangnya alur, tahapan dan pihak yang terkait penetapan PerDa di luar dinas pengusul rancangan peraturan (Bag. Hukum, Harmonisasi dengan Kemenkumham, Pansus DPRD, Biro Hukum Provinsi, kembali ke Pansus DPRD, penetapan peraturan); Perubahan struktur organisasi Urusan Bidang Tenaga Kerja masih dalam pembahasan di lingkup pemerintah kota dan DPRD.	Eksternal	UC	Tidak adanya payung hukum dalam pemberian fasilitas pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.	Pemerintah Daerah; Perangkat Daerah
	BIDANG PENGENDALIAN, PENGADUAN, DATA DAN INFORMASI Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal SUB KEGIATAN: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan								
			Pemohon izin tidak mendapat notifikasi status perizinan yang diajukan	RSO.BID0 3.01	Kepala Dinas	Belum ada fitur notifikasi yang mudah dan cepat untuk mengetahui status pengejukan izin	internal	C	Pemohon izin tidak bisa mengetahui status perizinan yang diajukan secara cepat dan mudah	1. Disnaker PMPTSP Kota Malang 2. Masyarakat pengguna aplikasi
			Aplikasi perizinan mengalami kendala kelancaran proses perizinan	RSO.BID0 3.02	Kepala Dinas	1. Aplikasi sedang diupdate, maintenance, sedang ada gangguan jaringan internet dan server	eksternal	UC	Proses perizinan terganggu	1. Disnaker PMPTSP Kota Malang 2. Masyarakat pengguna aplikasi

No	Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Renstra OPD	Risiko		Pemilik	Sebab		CIUC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Uraian		Sumber	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berbasis sistem terintegrasi secara elektronik	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Perizinan terbit tanpa melalui proses seharusnya yang menjadi kewenangan daerah	RSO.BID0 4.04	Kepala Dinas	kebocoran sistem OSS (hacker)	external	UC	perizinan tempat usaha tidak sesuai dengan peruntukan tempat usaha	1. Disnaker PMPTSP 2. Pelaku usaha 3. masyarakat
			Bukti pendukung persyaratan perizinan tidak sesuai standar/palsu	RSO.BID0 4.05	Kepala Dinas	kelemahan sistem OSS (tidak ada fitur verifikasi dan validasi keabsahan dokumen persyaratan perizinan)	external	UC	izin tempat usaha yang terbit tidak sah	1. Pemerintah Kota Malang 2. Disnaker PMPTSP 3. Pelaku usaha 4. masyarakat

Menyeluji,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRISASTYAWAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

19790709 199810 1 001

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
 Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal
 Urusan Pemerintahan : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

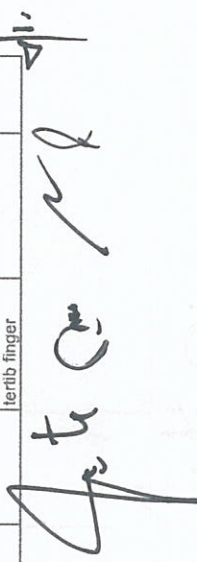
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Sebab ¹⁾			C/UC	Dampak ²⁾	Pihak yang Terkena	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik							Uraian	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA)	ROO.SEK.01	Sekretaris	Adanya revisi renstra yang perlu dikordinasikan dengan bidang-bidang; Keterbalasan waktu dan stabilitas traffic dalam input SIPD.	Internal	C	Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam renstra tidak tepat waktu.	DTKPMPTSP	Konsultasi dengan Bappeda	- Mengusulkan konsinyering yang dilakukan oleh Bappeda; - Menjadwalkan untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait.	
		Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKJIP, Monev, LKPJ, LPPD, LKPD)		ROO.SEK.02	Sekretaris	Belum tersedianya data dari masing-masing bidang dan pihak eksternal	Internal & Eksternal	C & UC	Lamanya waktu untuk pengambilan keputusan; Pengurangan TPP.	DTKPMPTSP	Melakukan money internal dan pendampingan/ desk ke bidang	Melakukan back up data kinerja, monitoring dan evaluasi internal.	
		Ketidakeesuaian perencanaan kebutuhan dengan Pagu anggaran		ROO.SEK.03	Sekretaris	Pemberian plafon anggaran SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan	Internal	C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	DTKPMPTSP	Sudah membuat KAK, RKA, RKEMD, RAB.	Mengusulkan Perwal mendahului untuk kegiatan yang penting dan mendesak; Koordinasi dengan BKAD dan Bappeda.	

[Handwritten Signature]

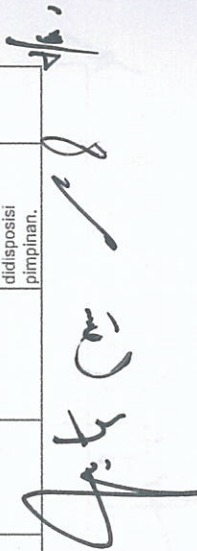
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian		Kode Risiko	Sebab ¹⁾		Sumber	CIUC	Dampak ²⁾		Pihak yang Terkena	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
			d	e		g	h			Uraian	Uraian				
a	b	c	d	e	f	g	h	i <td>j</td> <td>k</td> <td>l</td> <td>m</td> <td>n</td> <td></td> <td></td>	j	k	l	m	n		
			Ketidaksesuaian kode belanja.	ROO.SEK.04	Sekretaris	Kurang teliti pegawai pada saat kodefikasi dan input kode; Tidak tersedianya kode belanja dalam SIPD.	Internal & Eksternal	UC & C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	DTKPMPTSP	Verifikasi kodefikasi kegiatan ; Menyesuaikan dengan kode belanja yang ada dalam SIPD.	Verifikasi kodefikasi kegiatan dan indikator keluaran ; Reviu berjenjang ; Membuat usulan harga satuan baru dan PAK.			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	Pengajuan SPP-GU/LS belanja barang dan jasa terlambat	ROO.SEK.05	Sekretaris	Keterlambatan pengembalian dokumen pertanggungjawaban kegiatan oleh PPTK setelah diverifikasi oleh PPKKeu.	Internal	C	Keterlambatan pembayaran/pencairan GU/LS/TU	DTKPMPTSP	Mengingatkan PPTK melalui jipri via WA / telepon	Mengontrol, mengawal dan memverifikasi dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan dengan berkoordinasi antar staff keuangan; Membuat SOP pengajuan pencairan anggaran; Membuat money penyerapan anggaran.			
			Realisasi/serapan anggaran tidak mencapai target	ROO.SEK.06	Kepala Dinas	Adanya efisiensi anggaran ; Adanya sisa kontrak	Internal	C	Target Kinerja Anggaran tidak tercapai	DTKPMPTSP	Evaluasi internal bidang/sektariat Melakukan percepatan realisasi/serapan anggaran sesuai target dan waktu Membuat Laporan Money Kinerja Renja bulanan dan tribulan	Evaluasi internal bidang/sektaria Melakukan percepatan realisasi/serapan anggaran sesuai target dan waktu Membuat Laporan Money Kinerja Renja bulanan dan tribulan			

[Handwritten signature and initials]

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab ^y		C/UC	Dampak ^{xy}		Pengaruh yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	perseniasi BMD yang terinventarisir	Kejadian tertiban data barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.07	KEPALA DINAS	Uraian	Internal	C	Uraian	DTKPMPTSP	<p>Inventarisasi BMD, rekonsiliasi BMD secara berkala ; Mengikutsertakan pengurus barang untuk mengikuti bimtek/diklat.</p> <p>- Menyediakan gudang inventaris barang;</p> <p>- Menyimpan bukti pemegang barang;</p> <p>- Penjaga kantor, pemasangan teralis, brankas</p> <p>- Asuransi BMD (kendaraan)</p> <p>- Asuransi BMD teralis, brankas</p> <p>- Asuransi BMD dinas/operasional</p> <p>- Melakukan inventarisasi secara berkala</p>	<p>Inventarisasi BMD, rekonsiliasi BMD secara berkala ; Mengikutsertakan pengurus barang untuk mengikuti bimtek/diklat.</p> <p>- Menyimpan bukti pemegang barang;</p> <p>- Penjaga kantor, pemasangan teralis, brankas</p> <p>- Asuransi BMD (kendaraan)</p> <p>- Asuransi BMD teralis, brankas</p> <p>- Asuransi BMD dinas/operasional</p> <p>- Melakukan inventarisasi secara berkala</p>	
			Kehilangan/kerusakan barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.08	KEPALA DINAS	Uraian	Internal	C	Uraian	DTKPMPTSP	<p>- Tidak adanya gudang penyimpanan barang</p> <p>- Keterlambatan pembayaran premi asuransi;</p> <p>- Kesalahan dalam pemakaian BMD</p> <p>- Adanya pencurian;</p> <p>- Belum dilakukan inventarisasi/stok opname barang/persediaan secara menyeluruh</p>	<p>- Melakukan perbaikan/pengadaan mesin finger print;</p> <p>- Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk tertib finger</p>	
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	perseniasi pegawai yang terfasiliasi layanan masyarakat	Penyusunan laporan rekapitulasi absensi tidak akurat dan tidak tepat waktu	ROO.SEK.09	Sekretaris	Uraian	Internal	C	Uraian	DTKPMPTSP	<p>- adanya kerusakan mesin finger print</p> <p>- Aplikasi Sipret terkendala</p>	<p>- Melakukan perbaikan/pengadaan mesin finger print;</p> <p>- Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk tertib finger</p>	



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Sebab ^{*)}		C/UC	Dampak ^{*)}		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
					Uraian	Pemilik		Uraian	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	m	n
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	Kebutuhan kantor tidak terfasilitasi	ROO.SEK.10	Sekretaris	Tidak disusun identifikasi kebutuhan rencana kegiatan	C	Kegiatan yang telah direncanakan tidak terfasilitasi secara optimal	DTKPMPTSP	Pengawasan pemakalan secara berkala; Koordinasi dengan bidang terkait usulan RKBMD; Menyusun identifikasi kebutuhan rencana kegiatan; Pemantauan pelaksanaan SOP RKBMD, RKBMD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai RKBMD	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.SEK.11	Sekretaris	Tidak disusun identifikasi kebutuhan kantor melalui RKBMD yang didasari oleh standar harga dan standar kebutuhan; Keterlambatan input SIRUP	C	- barang hasil pengadaan over/under spek/volume - Keterlambatan proses pengadaan barang	DTKPMPTSP	Meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang terkait kebutuhan peralatan dan mesin lainnya - Menyusun identifikasi kebutuhan kantor dalam RKBMD - Melakukan input SIRUP tepat waktu - Memantau pelaksanaan SOP RKBMD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	Surat dinas tidak terkirim	ROO.SEK.12	Sekretaris	Pegawai yang menangani kurang cermat/leiti untuk memonitoring surat dinas; Disposisi surat tertambat.	C	Kegiatan tidak terlaksana/ tertambat	DTKPMPTSP	Mengirimkan melalui SURADI; memonitoring surat dinas masuk / keluar; Membuat klasifikasi jenis map surat yang urgent untuk didisposisi pimpinan.	


 J. K. S.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Sebab ¹⁾			C/UC	Dampak ²⁾		Pengaruh yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik		Uraian	Uraian			
a	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang terpelihara	Kerusakan barang milik daerah	ROO.SEK.13	KEPALA DINAS	Internal	Uraian	Uraian	Pengaruh yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
			Umur ekonomis barang milik daerah telah habis; Tidak adanya gudang penyimpanan barang inventaris; Kesalahan dalam pemakaian BMD.					Kegiatan tidak terlaksana/ terlambat/ terhambat	- Inventarisasi BMD secara berkala; - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Menyediakan gudang inventaris barang; - Mengembangkan pemeliharaan barang milik daerah - Membuat BAST dan rekap BAST antara pemegang barang dengan Kepala Dinas	- Inventarisasi BMD secara berkala; - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Menyediakan gudang inventaris barang; - Mengembangkan pemeliharaan barang milik daerah - Membuat BAST baru apabila ada pergantian pemegang barang	
BIDANG I (BIDANG TENAGA KERJA)											
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (1%)									
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pengangguran yang dilatih									
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	Peserta pelatihan tidak sesuai sasaran/kriteria	ROO.BID01.01	Bidang Seksi Pelatihan dan Produktivitas Naker	Eksternal	Uraian	Tujuan pelatihan terkait menciptakan lapangan / memberikan kesempatan kerja tidak tercapai	Unjuk DBHCT ada aplikasi untuk mendaftarkan Unjuk DBHCT hasil musren ada aplikasi supaya tidak terulang peserta nya itu.	Menerapkan SOP	

Gita

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab*)			C/UC	Dampak**)		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		Persentase peserta pelatihan keterampilan kerja (70%)	Peserta pelatihan tidak memenuhi kompetensi	ROO.BID01.02	Bidang Seksi Pelatihan dan Produktivitas Naker	Man Saat ujian kompetensi sakit, gangguan konsentrasi Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tujuan pelatihan terkait menciptakan lapangan / memberikan kesempatan kerja tidak tercapai	Dinas Bidang Masyarakat	Ujian ulang untuk kegiatan yang 2 gelombang Untuk barista bisa dilakukan ujian dari pihak LPK yang bersangkutan		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan											
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mengikuti bimtek	Tidak seluruh LPK yang terdaftar di kota Malang mengikuti kegiatan bimtek	ROO.BID01.03	Bidang Seksi Pelatihan dan Produktivitas Naker	Man Material Machine Money Kurangnya anggaran Method	Eksternal	UC	Ada LPK yang melanggar peraturan normatif terkait kewenangan selaku lembaga pelatihan	Dinas Bidang LPK Masyarakat			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak											
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)											



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak*)		Pengaruh yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Uraian		Sumber	Pihak yang Terkena			
a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdam pak pada kepentingan di 1 (satu) daerah/ Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Peserta bimtek tidak sesuai sasaran	ROO.BID01.04	Bidang Naker Seksi HI	Man Peserta yang dikirim tidak sesuai kriteria/sasaran undangan Material Machine Money Method	Esternal	UC	Tujuan bimtek terkait penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tsak tercapai	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja	Pengesahan PP melalui dinas	1. Membuat kolom jabatan dan nomor telepon pada daftar hadir bimtek 2. Data terkait Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB yang dimiliki Bidang Naker harus diolah lebih lanjut untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan bimtek	n
		Kegiatan yang dilaksanakan Meeting hallday sosialisasi PP dan PKB	Narsum kurang bisa menyampaikan materi dengan baik	ROO.BID01.05	Bidang Naker Seksi HI	Man Material Machine Money Method Pemilihan narsum harusnya melalui seleksi berdasarkan latar belakang kompetensi sekaligus kemampuan publik speaking	Internal	C	Tujuan bimtek terkait penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tsak tercapai	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja		1. Dalam surat permintaan ditambahkan kualifikasi terkait publik speaking 2. Pemilihan narsum berdasarkan referensi	
			Sasaran utama/ Perusahaan yang tidak mempunyai PP tidak menghadiri undangan	ROO.BID01.06	Bidang Naker Seksi HI	Man keterbatasan waktu dan jumlah tenaga kerja, kurangnya kesadaran pihak perusahaan Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tujuan bimtek terkait penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tsak tercapai	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja		Pendataan Perusahaan di Kota Malang secara rill beserta data terkait	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Demo mayday tetap terjadi (di sby)	ROO.BID01.07	Bidang Naker Masyarakat Kota Sby	Man Undangan menolak hadir Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tujuan sarasehan yaitu menekan aksi demo hari buruh tidak tercapai	Masyarakat Pemkot			

J. K. C. S.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf	
						Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			Pengendalian yang Ada
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		Kegiatan yang dilaksanakan Jasa penyelenggara an Event (Peningkatan Kapasitas Tim LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan) Meeting holiday Mayday dan UMK	Peserta sosialisasi UMK tidak sesuai sasaran	ROO.BID01.08	Bidang Naker Seksi HI	Man Peserta yang dikirim tidak sesuai kriteria/sasaran undangan Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tujuan sosialisasi UMK 'tidak tercapai	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja	Membuat kolom jabatan dan nomor telepon pada daftar hadir bimtek		
			Perselisihan Perusahaan dgn pekerja terkait UMK	ROO.BID01.09	Bidang Naker Seksi HI	Man Kesadaran akan hak makin tinggi Material Machine Money Keterbatasan keuangan perusahaan Method	Eksternal	UC	Hubungan Industrial tidak kondusif	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja	Sosialisasi UMK ada sanksi secara perundangan pengawas dari provinsi	Sosialisasi UMK melalui media lain agar pekerja mengetahui terkait UMK	
			Peserta peningkatan kapasitas tidak semua bisa ikut	ROO.BID01.10	Bidang Naker Seksi HI	Man Usia, Kesehatan, dan ketidakseediaan peserta untuk diganti Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tidak semua kandidat peserta mendapatkan pemahaman yang sama	Dinas Tim	Penggantian peserta yang berhalangan		
BIDANG 2 (BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL)													
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
		Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota											

Jitsi


No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf	
						Uraian	Sumber		Uraian yang Ada	Pihak yang Terkena			
a	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal (pameran, duta investasi, forum bisnis, match making, pembuatan company profile) tidak tepat waktu.	ROO.BID02.01	KABID PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL ; KASUB-SUBSTANSI PROMOSI DAN KEMITRAAN PENANAMAN MODAL	Kesiapan pihak eksternal (vendor dan perangkat daerah lain) yang terlibat; Kesulitan menjaring peserta duta investasi; Penentuan kriteria peserta penerima penghargaan forum bisnis.	Eksternal & Internal	UC & C	Kegiatan pameran dan pemilihan duta investasi tidak terlaksana atau tertunda; Tidak ada investor yang berinvestasi; Tidak tercapainya target kinerja.	DTKPMPTSP, Stakeholder (Pengusaha), Vendor (Penyelenggara Acara).	Penjaringan peserta duta investasi melalui daring dan luring; Koordinasi ke vendor pelaksana pameran; Menetapkan kriteria lebih rinci per sektor atas peserta Forum Bisnis.	n	
BIDANG 3 (BIDANG PENGENDALIAN, PENGADUAN, DATA DAN INFORMASI)													
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal												
	KEGIATAN: Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	ROO.BID3.01	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Disnaker PMPTSP Kota Malang	Fitur pada sistem (IZOL) perlu perbaikan	internal	C	Data yang kurang akurat pada perencanaan dan evaluasi	Disnaker PMPTSP Kota Malang	Pada saat sistem mengalami kendala dilakukan koordinasi dengan pengembangan aplikasi	Merencanakan dan berkoordinasi dengan pihak pengembangan untuk melakukan perbaikan fitur pada IZOL (ftur laporan izin masuk perlu diubah menjadi laporan permohonan masuk serta mengintegrasikan peta dari kominfo dengan izol)	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal												
	KEGIATAN:												

[Handwritten Signature]

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian		Kode Risiko	Pemilik	Sebab ¹⁾		CIUC	Dampak ²⁾		Pihak yang Terkena	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
			d	e			g	h		i	j				
a	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Kurangnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	ROO.BID3.02	Kepala Dinas	1. Data profil pelaku usaha banyak yang tidak diupdate oleh pelaku usaha, berupa status aktif dan tidak aktif serta lokasi yang tidak sama dengan yang diinput di dalam OSS 2. Kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan Investor dalam melaporkan LKPM 3. Kurangnya SDM seksi pengendalian dan pelaporan	Eksternal - Internal	UC-C	1. Kinerja tim pengawasan kurang efektif akibat data profil yang tidak update 2. Kondisi realisasi penanaman modal kurang terpantau dengan optimal 3. Tugas dan fungsi bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi DPMPPTSP terganggu	1. Dilakukan cek lokasi (survei lapangan) 2. Disnaker PMPTSP Kota Malang menyampaikan ke pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM 2. Dilakukan sosialisasi dan melakukan pembekuan atau pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak tertib LKPM 3x berturut-turut	1. Pemerintah Kota Malang 2. Disnaker PMPTSP Kota Malang 3. Pelaku usaha	1. Pemanggilan kepada Pelaku Usaha yang tidak tertib LKPM 2. Memberikan surat peringatan kepada Pelaku Usaha yang tidak tertib. 3. Mengusulkan dan melakukan pembekuan atau pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak tertib LKPM 3x berturut-turut			
BIDANG 4 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN EKONOMI, PARIWISATA, DAN SOSIAL BUDAYA)															
	Program Pelayanan Penanaman Modal														
	Pelayanan perizinan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata, sosial budaya sesuai standar													

Jite Sir M S

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab ¹⁾		C/UC	Dampak ²⁾		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf	
						Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			Pengendalian yang Ada
a	Penyediaan pelayanan perizinan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	ROO.BID4.01	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	g	1. Dinas teknis terkait belum menyampaikan perubahan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rekomendasi perizinan; 2. jaringan internet lambat/sadang dilakukan pemeliharaan sistem informasi sehingga tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SHZOL; 3. pelaku usaha belum memahami tata cara input data/ pemenuhan persyaratan dasar perizinan pada sistem OSS RBA 4. Pelaku usaha belum melakukan migrasi dari sistem OSS versi lama ke versi baru OSS RBA 5. Pelaku usaha kurang memahami penggunaan sistem OSS	UC	h	external	1. Dinas teknis terkait belum menyampaikan perubahan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rekomendasi perizinan; 2. jaringan internet lambat/sadang dilakukan pemeliharaan sistem informasi sehingga tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SHZOL; 3. pelaku usaha belum memahami tata cara input data/ pemenuhan persyaratan dasar perizinan pada sistem OSS RBA 4. Pelaku usaha belum melakukan migrasi dari sistem OSS versi lama ke versi baru OSS RBA 5. Pelaku usaha kurang memahami penggunaan sistem OSS	1. Pendampingan OSS 2. Pemenuhan SDM yang kurang dengan perekrutan tenaga pendukung operasional kegiatan	
			Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	ROO.BID4.02	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	g	1. kurang optimalnya Perangkat daerah teknis terkait dalam menindaklanjuti perubahan regulasi dari pusat; 2. jaringan internet lambat/tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SHZOL	UC	eksternal	1. kurang optimalnya Perangkat daerah teknis terkait dalam menindaklanjuti perubahan regulasi dari pusat; 2. jaringan internet lambat/tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SHZOL	1. Berkoordinasi dengan dinas teknis terkait 2. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha 3. pelekut masyarakat	1. Berkoordinasi dengan dinas teknis terkait dan non perizinan lintas dinas teknis terkait	
BIDANG 5 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEKERJAAN UMUM)													
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan PU sesuai standar											



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab ^{*)}		C/UC	Dampak ^{*)}		Pihak yang Terkena	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Sumber		Uraian	Uraian				
a	b Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	c jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	d Keterlambatan penerbitan ijin	e ROO.BID5.01	f Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Non Perizinan Pekerjaan Umum	g 1. Kekurangan berkas pada proses verifikasi (gambar dan survai lokasi) 2. Kekurangan personal 3. Kompetensi petugas loket yang berbeda sehingga penyampaian kepada pemohon tidak sesuai	h Internal dan Eksternal	i C	j 1. Keluhan dari pemohon 2. Kerja lembur	k 1. Masyarakat 2. Disnakerpmpptsp	l Mempercepat proses dengan lembur	m 1. Meningkatkan kompetensi 2. Penempatan sesuai dengan kompetensi (khususnya untuk TPOK)	n	
								C						
								C						
								C						

Merveyni,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRI SASRYAWAN S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
19790709 199810 1 001

Faint text at the top of the page, possibly a title or introductory paragraph.

Second section of faint text, appearing as a list or series of short paragraphs.

Third section of faint text, continuing the list or paragraphs.

Fourth section of faint text, possibly including a table or structured data.

Fifth section of faint text, appearing as a list or series of short paragraphs.

Sixth section of faint text, continuing the list or paragraphs.

Final section of faint text at the bottom of the page.

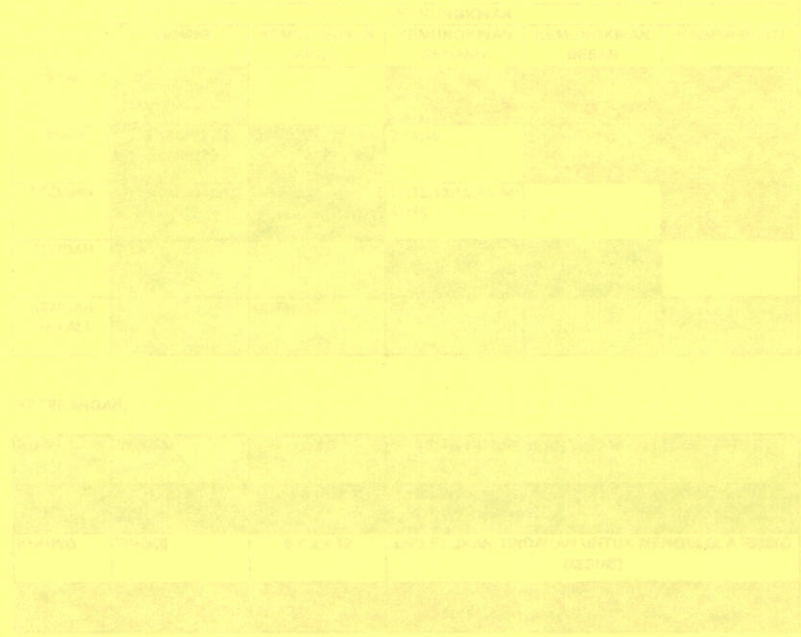
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur			
Tahun Penilaian		: 2023			
Tujuan Strategis		: Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan *)	Skala Dampak*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = d x e
I Risiko Strategis OPD					
1	Nilai SAKIB Kurang dari 81,85	RSO.SEK.01	1	3	3
2	Jumlah angkatan kerja yang terserap lapangan kerja kecil	RSO.BID01.01	3	4	12
3	Pada tahap perencanaan Isi kegiatan pelatihan pada sub kegiatan tidak secara langsung mendukung indikator kinerja yang dimaksud	RSO.BID01.02	2	3	6
4	Hubungan industrial tidak kondusif	RSO.BID01.03	2	4	8
5	Belum ada follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	RSO.BID01.04	4	4	16
6	Nilai investasi daerah lebih rendah dibandingkan tahun lalu	RSO.BID02.01	1	2	2
7	Keterlambatan penetapan PerDa terkait pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.	RSO.BID02.02	4	2	8
8	Penetapan PerDa yang terhambat.	RSO.BID02.03	4	2	8
9	Pemohon izin tidak mendapat notifikasi status perizinan yang diajukan	RSO.BID03.01	4	2	8
10	Aplikasi perizinan mengalami kendala sehingga mengganggu kelancaran proses perizinan	RSO.BID03.02	1	4	4
11	Pengawasan untuk Pelaku Usaha yang menjual minuman beralkohol masih belum optimal	RSO.BID03.03	3	3	9
12	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal belum optimal	RSO.BID03.04	3	3	9
13	masyarakat tidak puas dengan hasil konsultasi dan tindak lanjut pengaduan	RSO.BID03.05	3	3	9
14	Pelaku usaha/investor tidak jadi melakukan ekspansi usaha di Kota Malang	RSO.BID04.01	3	4	12
15	Pemenuhan pertanggungjawaban dokumen penerbitan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai yang dipersyaratkan	RSO.BID04.02	1	3	3
16	SDM pelaksana menerima gratifikasi/suap dari pelaku usaha atas layanan percepatan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan	RSO.BID04.03	1	3	3
17	Perizinan terbit tanpa melalui proses seharusnya yang menjadi kewenangan daerah	RSO.BID04.04	1	4	4
18	Bukti pendukung persyaratan perizinan tidak sesuai standar/patsu	RSO.BID04.05	3	3	9
II Risiko Operasional OPD					
SEKRETARIAT					
1	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA)	ROO.SEK.01	1	3	3
2	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKJIP, Monev, LKPJ, LPPD, LKPD)	ROO.SEK.02	1	4	4
3	Kelidaksesuaian perencanaan kebutuhan dengan Pagu anggaran	ROO.SEK.03	3	2	6
4	Kelidaksesuaian kode belanja.	ROO.SEK.04	1	4	4
5	Pengajuan SPP-GU/LS belanja barang dan jasa terlambat	ROO.SEK.05	2	3	6
6	Realisasi/serapan anggaran tidak mencapai target	ROO.SEK.06	1	3	3
7	Kelidakterliban data barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.07	1	3	3
8	Kehilangan/kerusakan barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.08	2	4	8
9	Penyusunan laporan rekapitulasi absensi tidak akurat dan tidak tepat waktu	ROO.SEK.09	1	4	4
10	Kebutuhan Kantor tidak terfasilitasi	ROO.SEK.10	1	4	4
11	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.SEK.11	1	4	4
12	Surat dinas tidak terkirim	ROO.SEK.12	3	2	6
13	Kerusakan barang milik daerah	ROO.SEK.13	1	4	4
BIDANG 1 (BIDANG TENAGA KERJA)					
1	Peserta pelatihan tidak sesuai sasaran/kriteria	ROO.BID01.01	2	3	6
2	Peserta pelatihan tidak memenuhi kompetensi	ROO.BID01.02	1	3	3
3	Tidak seluruh LPK yang terdaftar di kota malang mengikuti kegiatan bimtek	ROO.BID01.03	1	4	4
4	Peserta bimtek tidak sesuai sasaran	ROO.BID01.04	2	4	8
5	Narsium kurang bisa menyampaikan materi dengan baik	ROO.BID01.05	1	4	4
6	Sasaran utama/ Perusahaan yang tidak mempunyai PP tidak menghadiri undangan	ROO.BID01.06	2	4	8
7	Demo mayday tetap terjadi (di sbiy)	ROO.BID01.07	1	2	2
8	Peserta sosialisasi UMK tidak sesuai sasaran	ROO.BID01.08	1	4	4
9	Perselisihan Perusahaan dan pekerja terkait UMK	ROO.BID01.09	3	4	12
10	Peserta peningkatan kapasitas tidak semua bisa ikut	ROO.BID01.10	2	4	8
BIDANG 2 (BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL)					
1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal (pameran, duta investasi, forum bisnis, match making, pembuatan company profile) tidak tepat waktu.	ROO.BID02.01	2	2	4
BIDANG 3 (BIDANG PENGENDALIAN, PENGADUAN, DATA DAN INFORMASI)					
1	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	ROO.BID03.01	3	3	9
2	Kurangnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	ROO.BID03.02	3	3	9
BIDANG 4 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN EKONOMI, PARIWISATA, DAN SOSIAL BUDAYA)					
1	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	ROO.BID4.01	3	3	9
2	Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	ROO.BID4.02		3	9
BIDANG 5 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEKERJAAN UMUM)					
1	Keterlambatan penerbitan ijin	ROO.BID5.01	3	1	3
2	Kelidaktepatan pemberian lokasi izin untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ROO.BID5.02	2	1	2
3	Komplain warga atas penerbitan ijin PBG	ROO.BID5.03	2	1	2

Menyetujui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
19790709 199810 1 001

PETA NISJAK



No	Nama Fasilitas	Tipe Fasilitas	Luas Fasilitas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PETA RISIKO

		KEMUNGKINAN				
		JARANG	KEMUNGKINAN KECIL	KEMUNGKINAN SEDANG	KEMUNGKINAN BESAR	HAMPIR PASTI
D A M P A K	TINGGI SEKALI					
	TINGGI	10;17;20;22;27;28;29;31;34;36;39	4;26;35;37;41	2;14;40	5	
	SEDANG	1;15;16;19;24;25;33	3;23;32	11;12;13;18;43;44;45;46		
	RENDAH	6;38	42	21;30	7;8;9	
	RENDAH SEKALI		48;49	47		

KETERANGAN:

HIJAU	RENDAH	$x \leq 5$	TIDAK DIPERLUKAN TINDAKAN (ACCEPTABLE)
BIRU	SEDANG	$5 < x \leq 8$	DISARANKAN DIAMBIL TINDAKAN JIKA TERSEDIA SUMBERDAYA (SUPPLEMENTARY ISSUE)
KUNING	TINGGI	$8 < x \leq 12$	DIPERLUKAN TINDAKAN UNTUK MENGELOLA RISIKO (ISSUE)
MERAH	EKSTRIM	$12 < x \leq 25$	DIPERLUKAN TINDAKAN SEGERA UNTUK MENGELOLA RISIKO (UNACCEPTABLE)

No.	Kode Risiko	Rata2 Kemungkinan	Rata2 Dampak	Total Risiko	Kriteria Risiko	Tindakan yang Diambil
1	RSO.SEK.01	1,00	3,00	3,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
2	RSO.BID01.0 1	3,00	4,00	12,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
3	RSO.BID01.0 2	2,00	3,00	6,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
4	RSO.BID01.0 3	2,00	4,00	8,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
5	RSO.BID01.0 4	4,00	4,00	16,00	Ekstrem	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (Unacceptable)
6	RSO.BID02.0 1	1,00	2,00	2,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
7	RSO.BID02.0 2	4,00	2,00	8,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
8	RSO.BID02.0 3	4,00	2,00	8,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
9	RSO.BID03.0 1	4,00	2,00	8,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
10	RSO.BID03.0 2	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
11	RSO.BID03.0 3	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
12	RSO.BID03.0 4	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
13	RSO.BID03.0 5	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
14	RSO.BID04.0 1	3,00	4,00	12,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
15	RSO.BID04.0 2	1,00	3,00	3,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
16	RSO.BID04.0 3	1,00	3,00	3,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
17	RSO.BID04.0 4	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
18	RSO.BID04.0 5	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
SEKRETARIAT						
19	ROO.SEK.01	1,00	3,00	3,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
20	ROO.SEK.02	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
21	ROO.SEK.03	3,00	2,00	6,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
22	ROO.SEK.04	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
23	ROO.SEK.05	2,00	3,00	6,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
24	ROO.SEK.06	1,00	3,00	3,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
25	ROO.SEK.07	1,00	3,00	3,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
26	ROO.SEK.08	2,00	4,00	8,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
27	ROO.SEK.09	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
28	ROO.SEK.10	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
29	ROO.SEK.11	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
30	ROO.SEK.12	3,00	2,00	6,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
31	ROO.SEK.13	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
BIDANG 1 (BIDANG TENAGA KERJA)						
32	ROO.BID01.0 1	2,00	3,00	6,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
33	ROO.BID01.0 2	1,00	3,00	3,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
34	ROO.BID01.0 3	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
35	ROO.BID01.0 4	2,00	4,00	8,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
36	ROO.BID01.0 5	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
37	ROO.BID01.0 6	2,00	4,00	8,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
38	ROO.BID01.0 7	1,00	2,00	2,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
39	ROO.BID01.0 8	1,00	4,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
40	ROO.BID01.0 9	3,00	4,00	12,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
41	ROO.BID01.1 0	2,00	4,00	8,00	Sedang	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)
BIDANG 2 (BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL)						
42	ROO.BID02.0 1	2,00	2,00	4,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
BIDANG 3 (BIDANG PENGENDALIAN, PENGADUAN, DATA DAN INFORMASI)						
43	ROO.BID3.01	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
44	ROO.BID3.02	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
BIDANG 4 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN EKONOMI, PARIWISATA, DAN SOSIAL BUDAYA)						

No.	Kode Risiko	Rata2 Kemungkinan	Rata2 Dampak	Total Risiko	Kriteria Risiko	Tindakan yang Diambil
45	ROO.BID4.01	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
46	ROO.BID4.02	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)
BIDANG 5 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEKERJAAN UMUM)						
47	ROO.BID5.01	3,00	1,00	3,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
48	ROO.BID5.02	2,00	1,00	2,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)
49	ROO.BID5.03	2,00	1,00	2,00	Rendah	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)

TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10
TO ORDER OF	10



Small, faint handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

**Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda Tahun Penilaian : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur : 2023						
Tujuan Strategis : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel						
Urusan Pemerintahan : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayananan Terpadu Satu Pintu						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	I Risiko Strategis OPD Jumlah angkatan kerja yang terserap lapangan kerja kecil	RSO.BID01.01	12	Kepala Dinas	Man Kualifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (pendidikan tertalu tinggi/rendah/tidak sesuai jurusan) Material Machine Money Kurangnya dukungan anggaran untuk pelatihan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja Method Jenis pelatihan belum sesuai kebutuhan perusahaan	Meningkatnya angka pengangguran

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
2	Belum ada follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	RSO.BID01.04	16	Kepala Dinas	Man Material Machine Money Tidak ada anggaran terkait kegiatan follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan Method Belum ada kegiatan terkait follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	Tidak mengurangi angka pengangguran
3	Pengawasan untuk Pelaku Usaha yang menjual minuman beralkohol masih belum optimal	RSO.BID03.03	9	Kepala Dinas	1. maraknya tempat penjualan minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol ilegal/tidak berizin 2. Belum optimalnya koordinasi kegiatan pengawasan dengan Dinas Teknis terkait (Diskopindag) 3. Kurangnya SDM bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi	maraknya tempat penjualan minuman beralkohol ilegal mengganggu ketertiban umum

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
4	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal belum optimal	RSO.BID03.04	9	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha tidak taat dalam pemenuhan komitmen perizinan berusaha 2. Pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal belum dilaksanakan secara kontinyu serta pelaporannya belum dievaluasi secara maksimal 3. belum disusunnya perencanaan pemantauan (pemantauan hanya berupa jadwal yang dikirim dari pusat) 4. kurangnya sdm pendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal yang tidak dipenuhi memiliki dampak serius pada masyarakat. 2. meningkatnya pengaduan masyarakat 3. maraknya tempat usaha yang belum melengkapi komitmen perizinan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
5	masyarakat tidak puas dengan hasil konsultasi dan tindak lanjut pengaduan	RSO.BID03.05	9	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat atas perubahan persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan pendirian tempat usaha; kurangnya evaluasi dan analisa atas trend/kecenderungan topik permasalahan pengaduan Masyarakat kurang literasi terhadap persyaratan permohonan pengajuan izin 	Masyarakat kurang puas atas layanan yang sudah diberikan
6	Pelaku usaha/investor tidak jadi melakukan ekspansi usaha di Kota Malang	RSO.BID04.01	12	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> kebijakan pembatasan penerbitan ITPMB bagi pelaku usaha yang baru Tidak terlayannya pengajuan perizinan dari pelaku usaha (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol) yang baru 	<ol style="list-style-type: none"> Keluhan Pelaku Usaha atas sulitnya pengurusan perizinan ITPMB di Kota Malang; nilai investasi menurun maraknya tempat penjualan minuman beralkohol minum ditempat dan pengecer minuman beralkohol ilegal serta peredaran minuman beralkohol tidak terkontrol berkurangnya PAD
7	Bukti pendukung persyaratan perizinan tidak sesuai standar/palsu	RSO.BID04.05	9	Kepala Dinas	kelemahan sistem OSS (tidak ada fitur verifikasi dan validasi keabsahan dokumen persyaratan perizinan)	izin Tempat usaha yang terbit tidak sah
II Risiko Operasional OPD						

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Perselisihan Perusahaan dgn pekerja terkait UMK	ROO.BID01.09	12	Bidang Naker Seksi HI	Man Kesadaran akan hak makin tinggi Material Machine Money Keterbatasan keuangan perusahaan Method	Hubungan Industrial tidak kondusif
2	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	ROO.BID3.01	9	Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Disnaker PMPTSP Kota Malang	Fitur pada sistem (IZOL) perlu perbaikan	Data yang kurang akurat berimbas pada perencanaan dan evaluasi
3	Kurangnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	ROO.BID3.02	9	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data profil pelaku usaha banyak yang tidak diupdate oleh pelaku usaha, berupa status aktif dan tidak aktif serta lokasi yang tidak sama dengan yang diinput di dalam OSS 2. Kurangnya kesadaran dan ketidaktaatan Investor dalam melaporkan LKPM 3. Kurangnya SDM seksi pengendalian dan pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja tim pengawasan kurang efektif akibat data profil yang tidak update 2. Kondisi realisasi penanaman modal kurang terpetakan dengan optimal 3. Tugas dan fungsi bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi DPMPPTSP terganggu

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
4	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	ROO.BID4.01	9	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	<p>1. Dinas teknis terkait belum menyampaikan perubahan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rekomendasi perizinan;</p> <p>2. jaringan internet lambat/sedang dilakukan pemeliharaan sistem informasi sehingga tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SI-IZOL;</p> <p>3. pelaku usaha belum memahami tata cara input data/pemenuhan persyaratan dasar perizinan pada sistem OSS RBA</p> <p>4. Pelaku usaha belum melakukan migrasi dari sistem OSS versi lama ke versi baru OSS RBA</p> <p>5. Pelaku usaha kurang memahami penggunaan sistem OSS</p>	Keluhan Pelaku usaha atas sulitnya penggunaan sistem OSS

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
5	Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	ROO.BID4.02	9	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	1. kurang optimalnya Perangkat daerah teknis terkait dalam menindaklanjuti perubahan regulasi dari pusat; 2. jaringan internet lambat/tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SI-HZOL	Maraknya tempat usaha belum berizin

Menyetujui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I

19790709 199810 1 001

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur : 2023 : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis OPD Jumlah angkatan kerja yang terserap lapangan kerja kecil	RSO.BID01.01	Pelatihan dan bimtek peningkatan kompetensi	1. Peserta belum seluruhnya tepat sasaran dan terpantau apa yang dilakukan setelah mendapat pelatihan 2. Materi pelatihan belum sesuai kebutuhan perusahaan	1. Laporan terkait pekerjaan peserta setelah mengikuti pelatihan (by name by adress) Monev 2. Untuk penyusunan kamus usulan pelatihan yang akan datang memperhatikan indikator kinerja yang di dalamnya terdapat materi pelatihan yang sesuai kebutuhan perusahaan	Kepala Bidang	Desember 2023
2	Belum ada follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	RSO.BID01.04	-	-	Bursa Tenaga Kerja Mini gabungan dengan BKK yang bekerjasama dengan perusahaan	Kepala Dinas dan Kepala Bidang	2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Gelang Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3	Pengawasan untuk Pelaku Usaha yang menjual minuman beralkohol masih belum optimal	RSO.BID03.03	1. Pemantauan dari OSS 2. Tim pengawasan melakukan survei ke lapangan (Dinas teknis, SATPOL PP, APH, Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi)	Kegiatan tim pengawasan ke lapangan seringkali tertunda karena padatnya jadwal Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi dan menyesuaikan jadwal dinas teknis serta APH.	1. Merencanakan penambahan SDM di Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi 2. Selain kegiatan pengawasan lapangan, juga melakukan kegiatan pemanggilan kepada pelaku usaha dengan membawa semua dokumen perizinan dan membuat BAP nya 3. Meningkatkan koordinasi untuk operasi gabungan dengan Dinas Teknis dan APH perihal kegiatan pengawasan	Kepala Disnaker PMPTSP Kepala Dinas teknis Satpol PP APH	1. 2024 (perencanaan penambahan SDM) 2. Desember 2023 (kegiatan pengawasan dengan memanggil pelaku usaha, koordinasi dengan dinas teknis dan APH)
4	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal belum optimal	RSO.BID03.04	Bekerjasama dengan bidang lain dan OPD teknis untuk melakukan pemantauan sesuai sasaran yang dituju	Kurang nya SDM Pemantauan	1. Penambahan personil tim pengawasan serta penguatan kapasitas personil tim pengawasan 2. Membuat perencanaan pengawasan	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	penambahan personil tahun 2024 Peningkatan kapasitas SDM (Desember 2023)
5	masyarakat tidak puas dengan hasil konsultasi dan tindak lanjut pengaduan	RSO.BID03.05	Laporan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan. Laporan hasil konsultasi	Laporan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan masih perlu penyempurnaan (karena saat ini masih prototype)	1. Melakukan publikasi nomor whatsapp pengaduan 2. Menambah jumlah nomor whatsapp layanan pengaduan (termasuk whatsapp Kepala Dinas menjawab) 3. menyempurnakan laporan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan	1. Kepala Dinas pengendalian, pengaduan, data dan informasi	Desember 2023
6	Pelaku usaha/investor tidak jadi melakukan ekspansi usaha di Kota Malang	RSO.BID04.01	1. sosialisasi ketentuan pembatasan perizinan ITPMB 2. Penyusunan SOP Perizinan ITPMB	Perangkat daerah teknis terkait dan peserta sosialisasi (pelaku usaha) belum memahami materi sosialisasi	Dilakukan sosialisasi Penyusunan SOP Perizinan ITPMB	Kepala Dinas Kepala Bidang 03	Februari 2024 Juli 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
7	Bukti pendukung persyaratan perizinan tidak sesuai standar/palsu	RSO.BID04.05	melakukan verifikasi dan validasi lebih cermat	1. kelemahan sistem OSS 2. SDM tidak memiliki kompetensi menilai keabsahan dokumen	Berkoordinasi dengan BKPM Pusat terkait penambahan fitur upload dokumen pernyataan pelaku usaha menjamin keabsahan dokumen	Kepala Dinas Bidang 03	segera berkoordinasi dengan Bidang berwenang setelah muncul kasus dalam waktu 1 hari
II Risiko Operasional OPD							
1	Perselisihan Perusahaan dgn pekerja terkait UMK	ROO.BID01.09	Sosialisasi UMK ada sanksi secara perundangan pengawas dari provinsi	Perusahaan tidak mampu melaksanakan ketentuan terkait UMK dan tidak ada pengaduan terkait ini	Sosialisasi UMK melalui media lain agar pekerja mengetahui terkait UMK	Kabid	Tribunal ke empat 2023
2	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	ROO.BID3.01	Pada saat sistem mengalami kendala dilakukan koordinasi dengan pengembang aplikasi	Selama ini belum ada	Merencanakan dan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk melakukan perbaikan fitur pada IZOL (fitur laporan izin masuk perlu diubah menjadi laporan permohonan masuk serta mengintegrasikan peta dari kominfo dengan izol)	Bidang Pengendalian, Data Pengaduan, dan Informasi	Desember 2023
3	Kurangnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	ROO.BID3.02	1. Dilakukan cek lokasi (survei lapangan) sekaligus menyampaikan ke pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM 2. Dilakukan sosialisasi terkait LKPM kepada Pelaku Usaha 3. Program LKPM award untuk memberikan apresiasi kepada Pelaku Usaha yang patuh menyampaikan LKPM 4. Surat Teguran kepada Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan LKPM	Masih ada alamat tempat usaha tidak ditemukan atau perusahaan sudah tutup	1. Pemanggilan kepada Pelaku Usaha yang tidak terbit menyampaikan LKPM 2. Memberikan surat peringatan kepada Pelaku Usaha yang tidak terbit. 3. Mengusulkan dan melakukan pembekuan atau pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak terbit LKPM 3x berturut-turut	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pengendalian, Data Pengaduan, dan Informasi	Desember 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	ROO.BID4.01	1. pendampingan OSS 2. sosialisasi	1. Masih ada Pelaku usaha yg belum memahami sistem OSS 2. SDM ASN kurang secara kuantitas	1. Pendampingan OSS 2. Pemenuhan SDM yang kurang dengan perekrutan tenaga pendukung operasional kegiatan	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	1. Januari s/d Desember 2023 2. Desember N-1
5	Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	ROO.BID4.02	1. Berkoordinasi dengan dinas teknis terkait 2. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha	keterbatasan kewenangan	menyusun dan menguskan SOP perizinan dan non perizinan lintas dinas teknis terkait	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	September 2023

Menyetujui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRISASTYAWAN S, STP., M.Si
Pembina IV
19790709 199810 1 001



RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel Urusan Pemerintahan : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal , Pelayananan Terpadu Satu Pintu							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis OPD						
1	1. Laporan terkait pekerjaan peserta setelah mengikuti pelatihan (by name by adress) Monev 2. Untuk penyusunan kamus usulan pelatihan yang akan datang memperhatikan indikator kinerja yang di dalamnya terdapat materi pelatihan yang sesuai kebutuhan perusahaan	Laporan Monev	Bidang	Bidang, Dinas, Bappeda, DPR	Tribulan 1 2024		
2	Bursa Tenaga Kerja Mini gabungan dengan BKK yang bekerjasama dengan perusahaan	Grup WA	Bidang Tenaga Kerja	Masyarakat (SMK)	Semester 1 2024		
3	1. Merencanakan penambahan SDM di Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi 2. Selain kegiatan pengawasan lapangan, juga melakukan kegiatan pemanggilan kepada pelaku usaha dengan membawa semua dokumen perizinan dan membuat BAP nya 3. Meningkatkan koordinasi untuk operasi gabungan dengan Dinas Teknis dan APH perihal kegiatan pengawasan	1. Nota Dinas Perencanaan Penambahan SDM 2. Surat pemanggilan kepada Pelaku Usaha dan BAP 3. Notulen rapat koordinasi	Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Pelaku Usaha Dinas Teknis APH	1. Desember 2023 (perencanaan penambahan SDM) 2. sepanjang tahun 2023 (kegiatan pengawasan dengan memanggil pelaku usaha, koordinasi dengan dinas teknis dan APH)		
4	1. Penambahan personil tim pengawasan serta penguatan kapasitas personil tim pengawasan 2. Membuat perencanaan pengawasan	Rapat	Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Disnaker PMPTSP	Agustus 2023		
5	1. Melakukan publikasi nomor whatsapp pengaduan 2. Menambah jumlah nomor whatsapp layanan pengaduan (termasuk whatsapp Kepala Dinas menjawab) 3. menyempurnakan laporan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan	Sosialisasi melalui sosial media	Bidang Pengendalian, Pengaduan , Data dan Informasi	Masyarakat	sepanjang tahun 2023		
6	Dilakukan sosialisasi Penyusunan SOP Perizinan ITPMB	1. sosialisasi dengan mengundang pelaku usaha 2. nota dinas	Bidang Pelayanan perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan sosial Budaya	Pelaku usaha dan dinas teknis terkait	Februari 2024 Juli 2023		

7	Berkoordinasi dengan BKPM Pusat terkait penambahan fitur upload dokumen pernyataan pelaku usaha menjamin keabsahan dokumen	Komunikasi lisan kepada Kepala Dinas	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Kepala Dinas	Desember 2023		
II Risiko Operasional OPD							
1	Sosialisasi UMK melalui media lain agar pekerja mengetahui terkait UMK	Website, IG, Radio	Bidang dan Sub Koordinator sub substansi HI	Masyarakat (pekerja)	Desember 2023 - Februari 2024		
2	Merencanakan dan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk melakukan perbaikan fitur pada IZOL (fitur laporan izin masuk perlu diubah menjadi laporan permohonan masuk serta mengintegrasikan peta dari kominfo dengan izol)	membentuk group whatsapp dengan pihak pengembang	Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Pihak Pengembang (PT. Egref Telematika Nusantara)	Agustus 2023		
3	1. Pemanggilan kepada Pelaku Usaha yang tidak tertib menyampaikan LKPM 2. Memberikan surat peringatan kepada Pelaku Usaha yang tidak tertib. 3. Mengusulkan dan melakukan pembekuan atau pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak tertib LKPM 3x berturut-turut	Bersurat melalui email atau surat diantar langsung ke alamat pelaku usaha. Melalui whatsapp, telepon kepada Pelaku usaha	Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Pelaku Usaha	Selama tahun 2023		
4	1. Pendampingan OSS 2. Pemenuhan SDM yang kurang dengan perekrutan tenaga pendukung operasional kegiatan	1. penyediaan sarana dan prasarana ruang OSS 2. Perpanjangan perjanjian kontrak tpok	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	1. Pelaku usaha 2. masyarakat 3. tpok	1. Januari s/d Desember 2023 2. Desember-1		
5	menyusun dan mengusulkan SOP perizinan dan non perizinan lintas dinas teknis terkait	Rapat dan koordinasi	1. Dinas teknis terkait 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	September 2023		

Menyetujui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
19790709 199810 1 001

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan periz
 Urusan Pemerintahan : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis OPD						
1	Jumlah angkatan kerja yang terserap lapangan kerja kecil	Monev	Kepala Bidang Kepala Dinas	Tribulan 1 2024		
2	Belum ada follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	Laporan BKK dan Perusahaan Peserta	Bidang Tenaga Kerja Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Semester 2 2024		
3	Pengawasan untuk Pelaku Usaha yang menjual minuman beralkohol masih belum optimal	Rapat evaluasi setiap bulan	Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Setiap Bulan		
4	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal belum optimal	Rapat secara berkala	Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Rapat sebulan sekali tentang evaluasi pengawasan		
5	masyarakat tidak puas dengan hasil konsultasi dan tindak lanjut pengaduan	Konfirmasi dengan petugas pengaduan. Evaluasi bersama tim pengaduan setiap seminggu sekali	Kepala Bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi	rapat evaluasi seminggu sekali		
6	Pelaku usaha/investor tidak jadi melakukan ekspansi usaha di Kota Malang	evaluasi izin terbit	Bidang Pelayanan perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan sosial Budaya	per-tribulan		
7	Bukti pendukung persyaratan perizinan tidak sesuai standar/palsu	rapat dan koordinasi internal	Kepala Dinas	Desember 2023		
II Risiko Operasional OPD						
1	Perselisihan Perusahaan dgn pekerja terkait UMK	Pendataan (door to door)	Bidang dan Sub Koordinator sub substansi HI	Februari 2024- Maret 2024		
2	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	Diskusi antara bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi serta bagian pelayanan dan pihak pengembang . Laporan paket pekerjaan dari pihak pengembang	Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	Berkala setiap minggu		
3	Kurangnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Rapat Evaluasi bersama tim setiap bulan	Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi	setiap bulan		
4	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	1. pemantauan langsung oleh atasan langsung 2. pemantauan lansung dan evaluasi kinerja tpok	Kabid 03 dan 04	1. Januari s/d Desember 2023 2. DesemberN-1 dan Januari s/d Desember 2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
5	Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	monitoring dan evaluasi	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	September 2023		

Menyetujui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRI SASTYAWAN,S.STP..M.Si
Pembina Tk. I
19790709 199810 1 001

**PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
INSPEKTORAT DAERAH
2023**